

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 2012
TENTANG
PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR LAMPIRAN

- A. PENJABARAN SISTEMATIKA
- B. PENGISIAN FORMULIR RENSTRA
- C. PENGISIAN FOMULIR PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN
- D. GAMBARAN KETERKAITAN FORMULIR PENGUKURAN KINERJA
- E. PENGISIAN FORMULIR PENGUKURAN KINERJA:
 - 1 FORMULIR PENGUKURAN KINERJA TINGKAT POLRI;
 - 2 FORMULIR PENGUKURAN KINERJA SATKER TINGKAT MABES POLRI/POLDA;
 - 3 FORMULIR PENGUKURAN KINERJA SUBSATKER TINGKAT MABES POLRI/POLDA.

A. SISTEMATIKA LAKIP

Executive summary (Iktisar Eksekutif):

- pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut, serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya;
- disebutkan pula langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang.

I. PENDAHULUAN

- A. **LATAR BELAKANG:** peraturan perundang-undangan yang mewajibkan setiap Instansi Pemerintah (Polri) sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan Tupoksi dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepada Polri berdasarkan perencanaan strategis yang telah ditetapkan,
- B. **TUGAS dan FUNGSI:** uraian tentang tugas dan fungsi Polri berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- C. **STRUKTUR ORGANISASI:** uraian tentang Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kapolri Nomor 21 tentang SOTK pada tingkat Mabes Polri, Nomor 22 tentang SOTK pada tingkat Polda dan 23 tentang SOTK pada tingkat Polres dan Polsek, yang selanjutnya apabila ada perubahan terhadap ketentuan struktur organisasi Polri pada masa mendatang agar disesuaikan dengan perkembangan ketentuan tersebut.
- D. **SISTEMATIKA PENYAJIAN:** menggambarkan secara ringkas dan tata urutan muatan dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun.

II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

- A. **RENCANA STRATEGI,** Merupakan uraian singkat tentang rencana strategi Instansi Pemerintah (Polri) mulai dari visi, misi, tujuan, sasaran serta kebijakan dan program.
- B. **PENETAPAN KINERJA,** Disajikan Rencana Kinerja pada tahun yang bersangkutan, terutama menyangkut program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran pada tahun tersebut dan indikator kinerja keberhasilan dalam pencapaiannya.

III. AKUNTABILITAS KINERJA

- A. **PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA,** Pada bagian ini disajikan uraian perbandingan antara rencana capaian kinerja (target) dengan realisasi dari pada rencana capaian kinerja (target).
- B. **CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA,** Uraian capaian indikator kinerja secara proporsional dan akuntabel yang dapat memberikan gambaran tentang sejauh mana suatu organisasi dapat mencapai kinerjanya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta peran yang dipertanggungjawabkan kepada organisasi.

- C. **INDIKATOR CAPAIAN KINERJA**, pada bagian ini diuraikan hasil evaluasi dan analisis capaian kinerja setiap sasaran, perbandingan data kinerja, faktor penyebab keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran, hambatan atau kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil. Sistematika pembahasan dalam bagian ini disarankan untuk menguraikan analisis akuntabilitas kinerja setiap sasaran satu per satu. Artinya, setiap sasaran diuraikan secara tuntas mulai dari capaian kinerja, evaluasi dan analisis capaian kinerja, sampai dengan langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.
- D. **AKUNTABILITAS KEUANGAN**, uraian akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan alokasi anggaran sesuai dalam DIPA/RKA-KL/POK berikut realisasi anggaran pada tahun yang bersangkutan untuk mendukung program dan kegiatan dalam melaksanakan Tupoksi dan peran Instansi Pemerintah (Polri).

IV. PENUTUP

- A. **KESIMPULAN**, menggambarkan data secara umum tentang keberhasilan dan kegagalan serta permasalahan dan kendala yang berkaitan dengan kinerja Polri serta strategi dalam rangka pemecahan masalah yang akan dilaksanakan pada tahun mendatang.
- B. **SARAN TINDAK LANJUT**, berisikan saran dan tindak lanjut untuk meningkatkan kinerja unit organisasi/Satker dalam meningkatkan capaian kinerja.

Lampiran-lampiran

B. PENGISIAN FORMULIR RENSTRA

Tujuan	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja					Ket
			Thn. x1	Thn. x2	Thn. x3	Thn. x4	Thn. x5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

Petunjuk Pengisian:

1. Kolom (1) ditulis uraian tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka merealisasikan misi tujuan mengindikasikan sasaran, serta kebijakan dan program yang akan dilaksanakan;
2. Kolom (2) ditulis uraian sasaran strategis dalam rangka operasionalisasi tujuan yang telah ditetapkan didalam Renstra;
3. Kolom (3) ditulis indikator kinerja yang telah ditetapkan/diidentifikasi untuk diwujudkan, indikator ini dapat berupa keluaran (output) atau hasil (outcome), setiap sasaran dapat memiliki lebih dari satu indikator sasaran;
4. Kolom (4,5,6,7,8) ditulis dengan angka target kinerja yang akan dicapai untuk setiap indikator kinerja;
5. Kolom (9) ditulis mengenai keterangan yang berkaitan dengan rencana strategis, seperti, keterkaitan antara visi, misi tujuan, sasaran dan sebutkan sektor atau Satker lain atau pihak lain yang terkait.

C. PENGISIAN FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN

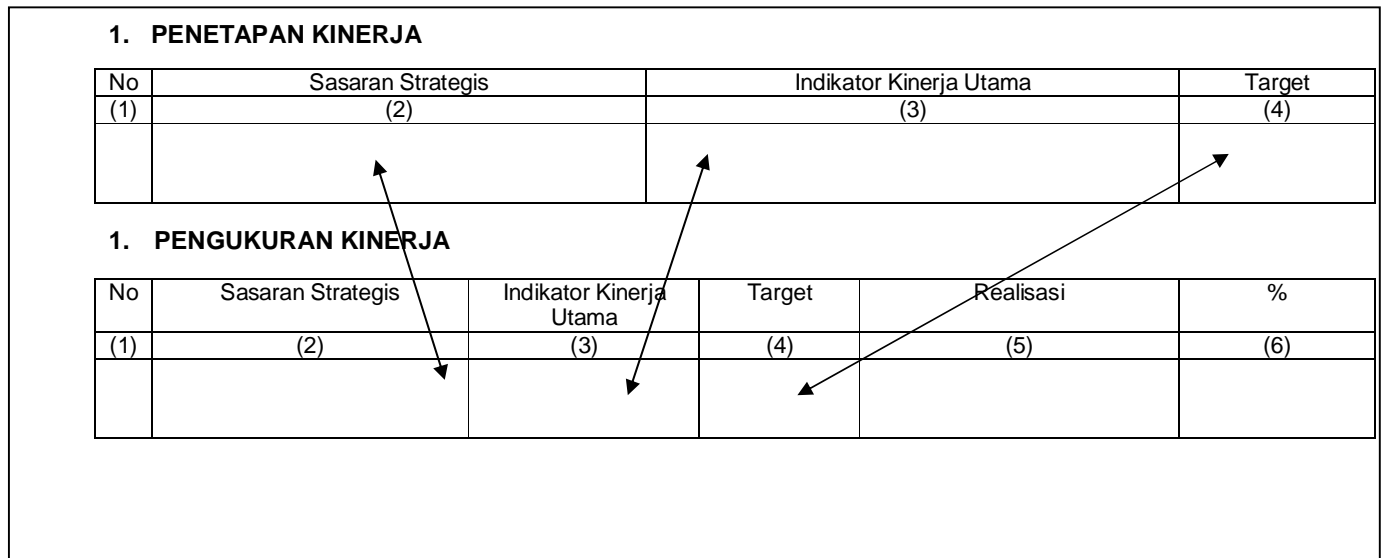
KL/Satker/Subsatker: (a)

Tahun : (b)

Sasaranstrategis	IndikatorKinerja	Target
(1)	(2)	(3)

Petunjuk Pengisian:

1. Header (a) diisi dengan nama KL/Satker/Subsatker;
2. Header (b) diisi dengan tahun anggaran;
3. Kolom (1) diisi dengan sasaran strategis KL/Satker/Subsatker sesuai dengan formulir Renstra;
4. Kolom (2) diisi dengan indikator kinerja sasaran strategis dari KL/Satker/Subsatker sesuai dengan formulir Renstra;
5. Kolom (3) diisi dengan angka target yang akan dicapai untuk setiap indikator kinerja sesuai dengan formulirRenstra;

D. GAMBAR KETERKAITAN FORMULIR PENGUKURAN KINERJA

E. PENGISIAN FORMULIR PENGUKURAN KINERJA

1. FORMULIR PENGUKURAN KINERJA TINGKAT POLRI

Kementerian /Lembaga : (a)

Tahun Anggaran : (b)

Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Program	Anggaran		
						Pagu	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

Jumlah Anggaran Tahun : Rp. (c)

Realisasi Pagu Anggaran Tahun : Rp. (d)

Petunjuk Pengisian:

- Header (a) diisi dengan kode dan nama kementerian negara/lembaga;
- Header (b) diisi dengan tahun anggaran;
- Kolom (1) diisi dengan sasaran strategis Kementerian/Lembaga sesuai dengan dokumen Penetapan Kinerja;
- Kolom (2) diisi dengan indikator kinerja sasaran stregetis dari Kementerian/Lembaga sesuai dengan dokumen Penetapan Kinerja;
- Kolom (3) diisi dengan angka target yang akan dicapai untuk setiap indikator kinerja sesuai dengan dokumen Penetapan Kinerja;
- Kolom (4) diisi dengan Realisasi dari masing-masing Indikator Kinerja;
- Kolom (5) diisi dengan persentase pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja;
- Kolom (6) diisi dengan nama program yang digunakan untuk pencapaian sasaran strategis organisasi sesuai dengan dokumen Penetapan Kinerja;
- Kolom (7) diisi dengan pagu anggaran program;
- Kolom (8) diisi dengan realisasi anggaran;
- Kolom (9) diisi dengan persentase realisasi anggaran (realiasi/ pagu x 100%);
- Footer (c) diisi total jumlah/nilai pagu anggaran yang direncanakan untuk mencapai sasaran strategis;
- Footer (d) diisi total jumlah/nilai realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran strategis.

2. FORMULIR PENGUKURAN KINERJA SATKER TINGKAT MABES
POLRI/POLDA

Satker/Polda : (a)

Tahun Anggaran : (b)

Sasaranstrategis	IndikatorKinerja	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

Jumlah Anggaran Program Tahun : Rp. (c)

Jumlah Realisasi Anggaran Program Tahun ... : Rp. (d)

Petunjuk Pengisian:

1. Header (a) diisi dengan kode dan nama Satker tingkat Mabes Polri/Polda;
2. Header (b) diisi dengan tahun anggaran;
3. Kolom (1) diisi dengan sasaran strategis Satker tingkat Mabes Polri/Polda sesuai dengan dokumen Penetapan Kinerja;
4. Kolom (2) diisi dengan indikator kinerja sasaran strategis dari Satker/Polda sesuai dengan dokumen Penetapan Kinerja;
5. Kolom (3) diisi dengan angka target yang akan dicapai untuk setiap indikator kinerja sesuai dengan dokumen Penetapan Kinerja;
6. Kolom (4) diisi dengan Realisasi dari masing-masing Indikator Kinerja;
7. Kolom (5) diisi dengan angka persentase pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja (realisasi/target x 100%);
8. Footer (c) diisi total jumlah/nilai pagu anggaran program yang direncanakan untuk mencapai sasaran strategis;
9. Footer (d) diisi total jumlah/nilai realisasi anggaran program yang digunakan untuk mencapai sasaran strategis.

3. FORMULIR PENGUKURAN KINERJA SUBSATKER TINGKAT MABES POLRI/POLDA

SubSatker : (a)

Tahun Anggaran : (b)

Sasaranstrategis	IndikatorKinerja	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

Jumlah Anggaran Kegiatan tahun : Rp. (c)

Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun ... : Rp. (d)

Petunjuk Pengisian:

1. Header (a) diisi dengan kode dan nama Subsatker tingkat Mabes Polri/Polda;
2. Header (b) diisi dengan tahun anggaran;
3. Kolom (1) diisi dengan sasaran strategis Subsatker sesuai dengan dokumen Penetapan Kinerja;
4. Kolom (2) diisi dengan indikator kinerja sasaran stretegis dari Subsatkersesuai dengan dokumen Penetapan Kinerja;
5. Kolom (3) diisi dengan angka target yang akan dicapai untuk setiap indikator kinerja sesuai dengan dokumen Penetapan Kinerja;
6. Kolom (4) diisi dengan Realisasi dari masing-masing Indikator Kinerja;
7. Kolom (5) diisi dengan persentase pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja ($\text{realisasi/target} \times 100\%$);
8. Footer (c) diisi total jumlah/nilai pagu anggaran kegiatan yang direncanakan untuk mencapai sasaran strategis;
9. Footer (d) diisi total jumlah/nilai realisasi anggaran kegiatan yang digunakan untuk mencapai sasaran strategis.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Oktober 2012

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

TIMUR PRADOPO